

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kerentanan dinilai berdasarkan parameter kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan lingkungan. Kerentanan bencana tsunami dan banjir gelombang pasang di pesisir Cilacap memiliki kategori tinggi. Berdasarkan perhitungan, nilai kerentanan bencana tsunami dan banjir gelombang pasang di pesisir Cilacap cenderung tinggi dan hanya di Kecamatan Cilacap Selatan yang memiliki kerentanan bencana tsunami dan banjir gelombang pasang sedang. Tingkat kerentanan bencana tsunami dan Banjir gelombang pasang yang tinggi menyebabkan potensi dampak kerugian yang tinggi apabila dilanda bencana.

Perbedaan kerentanan bencana tsunami dan Banjir gelombang pasang adalah pada parameter indikator kerentanan lingkungan. Parameter kerentanan lingkungan bencana tsunami adalah hutan alam, hutan lindung, dan hutan mangrove/bakau. Banjir gelombang pasang memiliki parameter kerentanan lingkungan bencana yaitu hutan alam, hutan lindung, hutan, mangrove/bakau, semak belukar, dan rawa.

2. Kapasitas wilayah pesisir Cilacap dinilai berdasarkan Kapasitas BPBD Kabupaten Cilacap, Kapasitas pemerintah kecamatan, dan Kapasitas masyarakat. Kapasitas dinilai berdasarkan beberapa parameter aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini dan kajian risiko bencana, Pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko dasar, pembangunan kesiapsiagaan. Berdasarkan perhitungan, BPBD Kabupaten Cilacap memiliki Kapasitas tinggi, pemerintah kecamatan memiliki Kapasitas dalam rentang sedang hingga tinggi, masyarakat pesisir Cilacap juga memiliki Kapasitas dalam rentang sedang hingga tinggi. Tingkat kapasitas mempengaruhi kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Resiliensi pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir Cilacap dinilai berdasarkan tingkat kerentanan. Resiliensi dianalisis dengan faktor sosial, faktor ekonomi, faktor fisik, dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil penilaian yang dinilai dari tingkat kerentanan bencana tsunami dan banjir gelombang pasang, resiliensi di wilayah pesisir Cilacap memiliki kategori rendah.

Resiliensi berdasarkan faktor sosial yaitu rendah. Wilayah pesisir Cilacap memiliki kepadatan penduduk sebanyak 2.441 jiwa/Km². Kepadatan penduduk berdasarkan

kecamatan, desa/kelurahan di wilayah pesisir Cilacap beragam. Rasio jenis kelamin di wilayah pesisir Cilacap berdasarkan hasil analisis cenderung seimbang dan tidak ada perbandingan yang terlalu jauh pada setiap kelompok umur, hal tersebut berkaitan dengan jumlah kelompok rentan di wilayah pesisir Cilacap yang dapat mempengaruhi risiko dampak bencana tsunami dan gelombang pasang.

Resiliensi berdasarkan faktor ekonomi yaitu rendah hingga sedang. Hal ini dipengaruhi oleh harga lahan dan luas lahan produktif di wilayah pesisir Cilacap yang cenderung tinggi, sehingga jika di nilai rupiah maka lahan produktif di wilayah pesisir cilacap tergolong tinggi. Pada wilayah Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Tengah memiliki luas lahan produktif yang lebih sedikit, karena lahan pada wilayah tersebut lebih banyak digunakan sebagai lahan permukiman. Maka, jika dinilai dari nilai rupiah lahan produktif, wilayah tersebut memiliki tingkat resiliensi ekonomi sedang.

Resiliensi berdasarkan faktor fisik yaitu rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya nilai objek jual di wilayah pesisir Cilacap yang mengakibatkan nilai rupiah dari permukiman, fasilitas umum dan fasilitas kritis di wilayah pesisir Cilacap tinggi. Luasnya kepadatan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas kritis mengakibatkan nilai kerugian yang tinggi apabila terjadi bencana di wilayah pesisir Cilacap.

Resiliensi berdasarkan faktor lingkungan yaitu tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tutupan lahan di wilayah pesisir Cilacap yang lebih banyak digunakan untuk permukiman. Hal ini dipengaruhi oleh sedikitnya parameter lingkungan yang ada di pesisir Cilacap. Dalam hal kerugian material terkait dampak bencana pada parameter lingkungan rendah, akan tetapi dari faktor ketahanan, sedikitnya parameter lingkungan dipesisir Cilacap akan meningkatkan dampak bencana pada wilayah daratan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan siaga bencana, terutama pada masyarakat yang belum paham tentang kebencanaan. Masyarakat yang paham tentang kebencanaan akan lebih siap siaga terhadap bencana. Pemerintah juga perlu menambah akses lowongan pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Cilacap. Selanjutnya, pemerintah perlu memberikan pemahaman terkait pola hidup dan kesehatan melalui sosialisasi yang diadakan oleh Puskesmas atau instansi kesehatan setempat untuk meningkatkan pemahaman tentang

kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terutama pada masyarakat kelompok rentan.

2. Pemerintah perlu mensosialisasikan terkait standar satuan harga lahan, sehingga harga lahan di pesisir Cilacap disesuaikan dengan kondisi wilayah. Sehingga masyarakat tidak membuat standar harga sendiri. Selain itu, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk memiliki usaha yang dapat bermitra dengan desa/kelurahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan lowongan pekerjaan juga dapat meningkatkan resiliensi untuk mengurangi risiko bencana.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi terkait perijinan untuk membangun permukiman di wilayah pesisir Cilacap. Sosialisasi tentang batas minimal pembangunan bangunan di pesisir pantai perlu ditegaskan kembali. Selanjutnya untuk fasilitas umum dan fasilitas kritis, dalam hal ini pemerintah perlu menjalin komunikasi dengan instansi – instansi yang berkaitan agar bangunan fasilitas umum dan fasilitas khusus menghindari zona bahaya bencana dan diupayakan bangunan tahan terhadap bencana. Hal tersebut dapat mengurangi tingkat kerugian dan akan meningkatkan kapasitas instansi dalam menghadapi bencana.
4. Pemerintah kecamatan perlu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, dan lembaga terkait tentang pembangunan pemecah ombak di wilayah pesisir Cilacap seperti halnya yang sudah ada di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Nusawungu. Penanaman semak belukar dan meningkatkan gumpuk pasir serta pembangunan tanggul yang juga dapat meningkatkan resiliensi untuk mengurangi risiko bencana pada faktor lingkungan.
5. Pemerintah pusat yaitu BNPB perlu mengkaji Perka. BNPB No. 2 Tahun 2012 terkait parameter dalam menentukan kerentanan bencana terutama pada bencana tsunami dan banjir gelombang pasang. Hal tersebut didasarkan bahwa penilaian kerentanan terhadap bencana tidak hanya didasarkan pada kerugian secara material, namun juga kerugian yang mungkin dapat berdampak pada ekosistem yang terdapat disekitar wilayah ancaman bencana tsunami dan banjir gelombang pasang.
6. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lembaga masyarakat atau NGO (*Non Government al Organization*) sebagai narasumber dalam penelitian. NGO memiliki banyak keterlibatan dalam aktivitas lingkungan dan sosial di Masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat resiliensi dalam menghadapi dampak bencana.